

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja merupakan fenomena yang sudah lama terjadi, yang berakar dari warisan kolonial melalui perjanjian Franco-Siamese yang terjadi pada tahun 1904 hingga 1907.¹ Perjanjian tersebut menghasilkan peta yang kemudian menjadi dasar sengketa wilayah, terutama pada kompleks Kuil Preah Vihear dan situs bersejarah lain di sepanjang garis perbatasan.² Ambiguitas dalam penetapan batas wilayah tersebut menyebabkan konflik sengketa terus berulang selama lebih dari satu abad. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962 menetapkan Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja, putusan tersebut tidak secara tegas menyelesaikan status wilayah di sekitarnya sehingga kawasan tersebut tetap menjadi area abu-abu yang rawan konflik.³

Ketegangan kembali terjadi pada tahun 2008 setelah UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia atas usulan Kamboja. Keputusan tersebut memicu sentimen nasional Thailand dan berujung pada bentrokan senjata yang berlangsung hingga tahun 2011 di sekitar Kuil Ta Muen Thom dan Ta Kwai.

¹ Pascal Medeville, "The Franco-Siamese Treaty of 23 March 1907: Borders, Politics, and the Return of Angkor," *Wonders of Cambodia*, February 11, 2026, <https://wondersofcambodia.com/the-franco-siamese-treaty-of-23-march-1907-borders-politics-and-the-return-of-angkor/>.

² Prabhakar Singh, "Of International Law, Semi-Colonial Thailand, and Imperial Ghosts," *Asian Journal of International Law* 9, no. 1 (January 2019): 46–74, <https://doi.org/10.1017/S204425131800005X>.

³ Martin Wagener, "Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low-Intensity Border Conflicts," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 30, no. 3 (September 2011): 27–59, <https://doi.org/10.1177/186810341103000302>.

Hal ini menunjukkan bahwa konflik Thailand dan Kamboja bukan hanya sekedar persoalan teknis penentuan batas wilayah, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas nasional, simbol sejarah, serta kepentingan politik domestik di kedua negara.

Setelah relatif mereda pasca kesepakatan penarikan pasukan pada 2011, ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali mengalami peningkatan sejak awal tahun 2025. Ketegangan tersebut disebabkan oleh tindakan provokasi nyanyian lagu kebangsaan Kamboja di wilayah sengketa Prasat Ta Muen Thom pada 13 Februari 2025 dan pembakaran paviliun Tri Muk pada akhir Februari 2025.⁴ Ketegangan tersebut meningkat menjadi bentrokan bersenjata pertama kali sejak tahun 2011, baku tembak yang terjadi pada 28 Mei 2025 menewaskan satu tentara Kamboja.⁵ Upaya penyelesaian yang dilakukan kedua komandan militer tidak mampu meredam eskalasi yang terjadi, terlebih setelah bocornya percakapan telepon antara pemimpin Kamboja dan Perdana Menteri Thailand yang memicu krisis politik di Thailand hingga berujung pada pemberhentian Perdana Menteri Thailand oleh Mahkamah Konstitusi.⁶ Puncak eskalasi konflik terjadi pada 24 Juli 2025 ketika baku tembak di sekitar kuil Ta Muen Thom berkembang menjadi konfrontasi militer terbuka yang melibatkan penggunaan artileri berat dan serangan udara oleh jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Thailand. Konflik tersebut dinilai sebagai salah satu konfrontasi militer paling serius di Asia

⁴ Jack Board, "CNA Explains: Why Thailand and Cambodia Are Clashing," *CNA*, July 24, 2025, <https://www.channelnewsasia.com/asia/thailand-cambodia-cna-explains-border-clash-history-5256341>.

⁵ Reuters, "TIMELINE: Thailand-Cambodia Conflict," *Bangkok Post*, Desember 2025, <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3152354/timeline-thailandcambodia-conflict>.

⁶ Vijitra Duangdee and Zaheena Rasheed, "Thai Court Removes Prime Minister Paetongtarn Shinawatra from Office," *Al Jazeera*, August 29, 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/8/29/thai-court-removes-prime-minister-paetongtarn-shinawatra-from-office> (Guangyong 2025) (Indonesia 2025) (Xinhua 2025) (McGowan 2025, Ma 2025)

Tenggara dalam hampir lima belas tahun terakhir yang menyebabkan puluhan korban jiwa dan ratusan ribu warga harus mengungsi.⁷

Meskipun sempat tercapai gencatan senjata melalui mediasi internasional yang melibatkan ASEAN, Amerika Serikat, dan Tiongkok di Putrajaya, perdamaian tersebut tidak bertahan lama. Pada Desember 2025, pertempuran kembali pecah setelah Thailand mencabut gencatan senjata secara sepihak menyusul insiden ranjau baru, yang menimbulkan korban jiwa bertambah dan memaksa satu juta warga mengungsi.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa akar sengketa Thailand dan Kamboja tidak dapat diselesaikan jika hanya menggunakan kesepakatan gencatan senjata semata, diperlukan mekanisme penyelesaian yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Di tengah eskalasi konflik yang terjadi, posisi Tiongkok menjadi perhatian penting, mengingat kedekatan strategisnya dengan kedua negara yang berkonflik. Hubungan Tiongkok dan Kamboja digambarkan sebagai *Ironclad Friendship* yang tercermin dari kemitraan strategis komprehensif sejak 2010, perjanjian perdagangan bebas pada 2020, serta besarnya investasi Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI).⁹ Kedekatan tersebut juga meluas ke sektor pertahanan, terutama melalui keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan dan modernisasi Pangkalan Angkatan Laut Ream yang dinilai memiliki nilai strategis bagi kepentingan Tiongkok di Asia Tenggara.

⁷ Sun Guangyong and Chen Qingqing, "Update: Cambodia and Thailand Exchange Fire at Border; Thai Military Deploys F-16 Fighter Jets to Bomb Cambodian Military Installations," *Global Times*, July 24, 2025, <https://www.globaltimes.cn/page/202507/1339133.shtml>.

⁸ "Kamboja Dan Thailand Gencatan Senjata – Apa Saja Perjanjian Yang Mereka Sepakati Dalam Perundingan Di Malaysia?," *BBC News Indonesia*, July 24, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8138dy49do>.

⁹ Xinhua, "Cambodia-China 'Rock-Solid' Ties Based on Profound Historical Roots: Cambodian Expert," *Xinhua*, March 26, 2025, <https://english.news.cn/20250326/5e9777086fb9403aab1ba374cd66158c/c.html>.

Di sisi lain, Tiongkok juga memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Thailand. Sejak terjalannya kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013, kerja sama ekonomi Tiongkok dan Thailand mengalami peningkatan, menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Thailand selama lebih dari satu dekade sekaligus salah satu sumber investasi asing utama di negara tersebut. Meskipun demikian, Thailand tetap mempertahankan hubungan pertahanan yang kuat dengan Amerika Serikat sebagai sekutu utama di luar NATO, sementara kerja sama militernya dengan Tiongkok juga terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.¹⁰

Kondisi tersebut menempatkan Tiongkok dalam dilema strategis di tengah konflik, di satu sisi memiliki kedekatan politik dan pertahanan dengan Kamboja, di sisi lain memiliki kepentingan ekonomi dengan Thailand yang membuat Tiongkok berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar hubungan Tiongkok dengan Thailand dan Kamboja tetap terjaga dan melindungi kepentingan strategis Tiongkok di kawasan. Dilema tersebut tercermin dalam respon Tiongkok selama konflik berlangsung. Tiongkok memilih pendekatan diplomasi senyap melalui saluran institusional dan pertemuan tertutup.¹¹ Sejak awal eskalasi Tiongkok secara konsisten menyatakan sikap tidak memihak, mendukung netralitas ASEAN, dan mendorong penyelesaian melalui dialog dan mekanisme regional yang telah ada.¹² Komitmen tersebut diwujudkan

¹⁰ Abi McGowan and Annabel Richter, "China in the Indo-Pacific: July 2025," Council on Foreign Relations (CFR), Council on Foreign Relations, August 19, 2025, <https://www.cfr.org/articles/china-indo-pacific-july-2025?>

¹¹ Bo Ma and Zining Xu, "Mediation with Chinese Characteristics in the 2025 Thailand–Cambodia Border Crisis," *East Asia Forum*, December 16, 2025, <https://eastasiaforum.org/2025/12/16/mediation-with-chinese-characteristics-in-the-2025-thailand-cambodia-border-crisis/>.

¹² "Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian's Regular Press Conference on October 17, 2025," Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, October 17, 2025, https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/fyrbt/202510/t20251017_11735636.html

melalui penyelenggaraan pertemuan konsultasi Trilateral informal yang dimulai di Shanghai pada Juli 2025 dan berlanjut di Anning pada Agustus 2025, serta serangkaian *shuttle diplomacy* oleh Utusan Khusus Tiongkok untuk urusan Asia, Deng Xijun.¹³ Pendekatan ini menunjukkan upaya Tiongkok untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan kepentingan strategisnya dengan kedua negara.

Fenomena tersebut menjadikan Tiongkok dalam konflik Thailand dan Kamboja 2025 sebagai objek kajian yang menarik untuk diteliti. Stabilitas Asia Tenggara memiliki arti penting bagi Tiongkok mengingat persaingan pengaruh di Indo-Pasifik, keberlangsungan proyek BRI di Kamboja, hubungan perdagangan yang erat dengan Thailand, serta kepentingan strategisnya di kawasan Teluk Thailand.¹⁴ Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Tiongkok mendefinisikan dan menjalankan perannya dalam konflik regional di Asia Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja 2025 menimbulkan dilema yang penting untuk dikaji karena menunjukan keterbatasan ASEAN dalam mempertahankan sentralitasnya sebagai penjaga stabilitas keamanan regional yang menyebabkan terbukanya ruang bagi kekuatan eksternal untuk terlibat. Di antara aktor-aktor eksternal yang terlibat, Tiongkok menempati posisi yang paling kompleks sehingga Tiongkok

¹³ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "Special Envoy for Asian Affairs of the Ministry of Foreign Affairs Visits Cambodia for Work on the Cambodia-Thailand Border Conflict," Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China, September 13, 2025, https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202509/t20250916_11708905.html.

¹⁴ Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Thailand, "Bilateral Relations," Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Thailand, December 19, 2023, <https://th.china-embassy.gov.cn/eng/ztx/gxgk/>.

memilih untuk melakukan pendekatan diplomasi senyap melalui saluran institusional dan pertemuan tertutup. Hubungan strategis Tiongkok yang erat dengan kedua negara yang berkonflik menuntut Tiongkok untuk mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan citra geopolitiknya. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendefinisian dan penerapan peran nasional Tiongkok dalam konflik tersebut menggunakan kerangka *National Role Conceptions* dari K.J. Holsti.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah: “Bagaimana peran Tiongkok dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja 2025?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: “Mengidentifikasi dan menganalisis peran Tiongkok dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja 2025 berdasarkan pernyataan resmi, kebijakan luar negeri, dan langkah diplomatik yang diambil Tiongkok dengan menggunakan teori *National Role Conceptions* (NRC) dari K.J. Holsti.”

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yang mana:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penerapan teori *National Role Conceptions* Holsti pada studi kasus kontemporer di kawasan Asia Tenggara,

mengingat teori ini pada awalnya lebih banyak diaplikasikan pada studi kebijakan luar negeri negara-negara Barat maupun negara berkembang lain di Afrika dan Timur Tengah. Dengan menghadirkan studi kasus konflik perbatasan Thailand-Kamboja 2025, penelitian ini turut menyumbang perspektif baru pada diskusi tentang bagaimana negara besar seperti Tiongkok mendefinisikan perannya ketika berhadapan dengan konflik intra-kawasan yang melibatkan lebih dari satu mitra strategisnya sekaligus, sebuah situasi yang relatif jarang dibahas dalam literatur *role theory* yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal oleh akademisi Hubungan Internasional untuk memahami pola perilaku Tiongkok dalam merespon konflik-konflik serupa kedepannya, terkhusus pada konflik sesama anggota ASEAN yang memiliki hubungan strategis dengan Tiongkok. Bagi pembuat kebijakan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Tiongkok dalam isu keamanan kawasan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi diplomatik yang lebih tepat. Sementara itu, bagi mahasiswa dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai peran negara dan kebijakan luar negeri, khususnya melalui penerapan kerangka *National Role Conceptions* dari K.J. Holsti.

1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti. Studi pustaka nantinya akan membantu peneliti dalam meneliti penelitian ini, beberapa sumber bacaan yang menurut peneliti relevan dengan tema besar yang peneliti teliti, diantaranya:

Literatur pertama, artikel jurnal yang berjudul *Analysis of the Preah Vihear Temple Dispute in the Perspective of International Law on the Acquisition of State Territorial Sovereignty*.¹⁵ Artikel jurnal yang ditulis oleh Darminto Hartono dan Anisyah Rani menjelaskan mengenai sengketa Kuil Preah antara Thailand dan Kamboja yang merupakan salah satu konflik perbatasan paling kompleks di Asia Tenggara yang sudah berlangsung lebih dari enam dekade, berakar pada perbedaan interpretasi peta kolonial Prancis dan klaim kedaulatan atas wilayah sekitar kuil. Konflik ini dimulai setelah Kamboja merdeka pada tahun 1953, dengan Thailand mengerahkan pasukannya ke wilayah kuil dan memindahkan artefak. Setelah upaya diplomatik gagal, kasus ini diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ). ICJ pada tahun 1962 memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear adalah bagian dari wilayah Kamboja, dan menegaskan kembali kedaulatan Kamboja atas seluruh area kuil pada tahun 2013 setelah Kamboja mengajukan permohonan reinterpretasi. Keputusan ini didasarkan pada Peta Lampiran I tahun 1907 yang dibuat oleh otoritas kolonial Prancis, yang menunjukkan wilayah Dânggrêk Mountains sebagai bagian dari Kamboja. Meskipun Thailand menolak

¹⁵ Darminto Hartono and Anisyah Rani, *Analysis of the Preah Vihear Temple Dispute in the Perspective of International Law on the Acquisition of State Territorial Sovereignty*, 24 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6495>.

validitas peta tersebut, ICJ menggunakan peta tersebut sebagai dasar karena Thailand tidak pernah mengajukan keberatan saat peta tersebut dikomunikasikan.

Analisis hukum internasional menunjukkan bahwa putusan ICJ didasarkan pada prinsip-prinsip *estoppel*, *acquiescence*, dan *uti possidetis juris*, yang memperkuat klaim Kamboja. Penyelesaian melalui adjudikasi internasional ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi klaim Kamboja dan menekankan pentingnya menghormati batas-batas warisan kolonial sesuai dengan hukum internasional. Sengketa ini juga menyoroti kebutuhan untuk melindungi warisan budaya dunia di tengah konflik antar negara. Kontribusi Artikel jurnal ini adalah membantu penelitian dalam memahami konflik perbatasan yang terjadi antara Thailand-Kamboja serta membantu memahami terkait analisis keputusan yang dibuat oleh ICJ. Penelitian ini dapat menjadi dasar analisis legal Tiongkok dalam perspektif hukum Internasional. Hartono dan Rani menganalisis Preah Vihear dari perspektif Hukum Internasional hingga 2013, namun tidak membahas peran aktor eksternal seperti Tiongkok dalam eskalasi 2025 yang melibatkan dinamika real politik kawasan.

Literatur kedua adalah, artikel jurnal berjudul *The Thai–Cambodian Border in International Relations: Constructing a Third Space in Geopolitics*.¹⁶ Artikel yang ditulis oleh Thanachate Wisaijorn mengkaji hubungan perbatasan Thailand- Kamboja melalui sudut pandang geopolitik kritis, khususnya dengan menggunakan konsep *territorial trap* yang diperkenalkan oleh John Agnew dan konsep *Third Space* yang

¹⁶ Thanachate Wisaijorn, “The Thai–Cambodian Border in International Relations: Constructing a Third Space in Geopolitics,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, October 16, 2025, 18681034251385116, <https://doi.org/10.1177/18681034251385116>.

berakar dari pemikiran Homi Bhabha. Wisaijorn berargumen bahwa kajian hubungan Thailand-Kamboja dalam literatur Hubungan Internasional selama ini terjebak dalam asumsi negara sebagai unit yang tertutup dan berdiri sendiri (*self-contained state*), dikotomi dalam atau luar (*inside or outside*), serta monopoli narasi perbatasan oleh kelompok elit baik aktor kolonial maupun pemimpin negara.

Dengan menelaah literatur Hubungan Internasional sejak kemerdekaan Kamboja tahun 1953 hingga konflik militer 2025, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai pendekatan telah diupayakan termasuk integrasi narasi historis, perluasan analisis ekonomi global, dan pengakuan perubahan tatanan geopolitik ketiganya masih gagal melepaskan diri dari jebakan teritorial tersebut. Sebagai respons, Wisaijorn mengusulkan *Third Space* sebagai kerangka analitis alternatif yang memindahkan fokus dari diplomasi formal dan kebijakan negara menuju praktik sehari-hari masyarakat di kawasan perbatasan termasuk buruh migran, pedagang lintas batas, wisatawan, dan pasien yang mengakses layanan kesehatan di negara tetangga. Literatur ini menegaskan bahwa perbatasan bukanlah garis tetap yang dipertahankan oleh negara, melainkan ruang sosial yang diperebutkan, dinegosiasikan, dan dibentuk ulang secara terus-menerus oleh berbagai aktor non-negara. Kontribusi literatur ini adalah memberikan gambaran peta historis yang sistematis tentang hubungan Thailand-Kamboja dari 1953 hingga 2025, termasuk data spesifik mengenai eskalasi konflik Juli 2025 yang menjadi periode inti penelitian. Data seperti jumlah korban, penutupan pos perbatasan, dan dinamika politik domestik kedua negara dapat digunakan sebagai latar belakang empiris yang sudah dikaji secara akademis dalam jurnal bereputasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fokus penelitian ini terletak pada manuver diplomatik dan

militer, hal tersebut menjadi celah penelitian, karena posisi aktor eksternal seperti Tiongkok sebagai fokus analisis utama, bukan sekadar variabel latar, masih belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur yang ada. Wisaijorn memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi pendekatan negara sentris dalam kajian hubungan Thailand-Kamboja dan menawarkan perspektif alternatif melalui konsep Third Space.

Namun demikian, artikel tersebut tidak menelaah posisi dan peran Tiongkok sebagai kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan strategis di tengah konflik kedua negara. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan Tiongkok sebagai subjek analisis utama, menggunakan Teori Peran sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana sebuah negara mendefinisikan dan menjalankan perannya dalam sistem internasional.

Literatur ketiga, artikel jurnal yang berjudul *Implementation of the ASEAN Way in Resolving the Dispute Conflict between Thailand – Cambodia in 2011*.¹⁷ Literatur ini mengkaji implementasi mekanisme ASEAN Way dalam upaya penyelesaian konflik perbatasan Thailand-Kamboja di kawasan Candi Preah Vihear pada tahun 2011. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, penelitian ini berargumen bahwa ASEAN Way yang berlandaskan pada prinsip non-interferensi, penyelesaian damai, konsensus, dan penolakan terhadap penggunaan kekerasan merupakan instrumen diplomasi regional yang efektif dalam meredam eskalasi konflik antarnegara anggota. Penelitian ini mengidentifikasi dua jalur diplomatik utama yang

¹⁷ Ananda Ramadhanti Utomo and Sidiq Ahmadi, "Implementation of the ASEAN Way in Resolving the Dispute Conflict between Thailand - Cambodia in 2011," *Proceedings University of Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference* 3, no. 1 (November 2023): 94–101, <https://doi.org/10.18196/umygrace.v3i1.537>.

diterapkan ASEAN dalam menangani konflik tersebut, yakni *Track One Diplomacy* berupa *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa serta pertemuan tiga negara di Bogor, dan *Track Two Diplomacy* berupa Pertemuan Informal Menteri Luar Negeri ASEAN pada Februari 2011 yang menghasilkan komitmen bersama untuk menghindari bentrokan bersenjata lebih lanjut. Literatur ini juga mendokumentasikan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam mengirimkan tim pemantau ke kawasan perbatasan pasca-keputusan ICJ tahun 2012 yang menetapkan kawasan sekitar Candi Preah Vihear sebagai zona steril.

Secara keseluruhan, Utomo dan Ahmadi menyimpulkan bahwa meskipun keputusan final tetap berada di tangan ICJ, ASEAN berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai mediator regional yang mampu meredam penggunaan kekuatan militer secara nyata melalui mekanisme ASEAN Way, sekaligus menegaskan bahwa prinsip non-interferensi yang menjadi ciri khas ASEAN perlu ditinjau ulang agar lebih fleksibel dalam menghadapi konflik yang memiliki dampak lintas batas. Kontribusi literatur ini adalah sebagai dokumentasi secara sistematis bagaimana konflik Thailand–Kamboja pada periode 2008–2011 berkembang dari sengketa diplomatik menjadi konfrontasi militer terbuka. Data historis ini termasuk kronologi eskalasi, keterlibatan militer, dan proses penyelesaian dapat Anda gunakan sebagai pembanding struktural untuk memahami pola berulang konflik yang kembali meledak pada 2023–2025. Ini memperkuat argumen peneliti bahwa konflik ini bersifat berstruktur dan siklikal, bukan insiden tunggal. Penelitian ini secara mengakui keterbatasan mekanisme ASEAN Way khususnya bahwa proses mediasi terhambat ketika salah satu pihak (Thailand) menolak hadir dalam pertemuan tripartit. Temuan ini sangat relevan untuk memperkuat

justifikasi penelitian ketika ASEAN terbukti tidak cukup efektif, maka keterlibatan aktor eksternal seperti Tiongkok menjadi variabel penting yang perlu dikaji. Dengan kata lain, artikel ini secara tidak langsung membuka ruang bagi penelitian yang peneliti lakukan tentang peran Tiongkok.

Utomo dan Ahmadi mendokumentasikan implementasi ASEAN Way dalam penyelesaian konflik Thailand–Kamboja periode 2011 dan mengidentifikasi keterbatasan struktural ASEAN sebagai mediator, terutama ketika salah satu pihak menolak berpartisipasi dalam proses mediasi. Namun demikian, kajian tersebut tidak membahas peran aktor eksternal khususnya Tiongkok yang justru semakin determinan dalam dinamika konflik pada periode 2023–2025. Penelitian ini hadir untuk melengkapi temuan Utomo dan Ahmadi dengan menganalisis bagaimana Tiongkok berperan di tengah keterbatasan mekanisme ASEAN tersebut.

Literatur keempat, *Chinese influence in Southeast Asia under the Belt and Road Initiative: The cases of Cambodia and Thailand*.¹⁸ Ditulis oleh Claudia de Martín Olea. Penelitian ini berisikan pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara melalui skema *Belt Road Initiative*, dengan berfokus kepada perbandingan antara Thailand dan Kamboja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu Realisme dan Neo-Marxisme. Realisme sendiri digunakan untuk menjelaskan BRI sebagai instrumen proyeksi kekuatan keamanan ekonomi dan militer Tiongkok. Sedangkan Neo-Marxisme digunakan untuk membaca BRI sebagai bentuk ekspansi kapitalis dan Neo-Kolonialisme modern. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji empat

¹⁸ Claudia de Martín Olea, *Chinese Influence in Southeast Asia under the Belt and Road Initiative*; , n.d.

variabel utama pada kedua negara, yaitu sistem ekonomi, aliran investasi asing langsung dari Tiongkok, diaspora Tiongkok, serta kerjasama pembangunan Tiongkok. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kamboja jauh lebih bergantung pada Tiongkok dibanding Thailand, hal tersebut tercermin dari lebih dari separuh investasi asing langsung kamboja yang berasal dari Tiongkok, sekitar 43% utang Kamboja berasal dari Tiongkok. Sebaliknya ekonomi Thailand jauh lebih terdiversifikasi, dengan Tiongkok memang menjadi investor asing utama sejak tahun 2025, namun investasinya tersebar ke berbagai sektor tanpa dominasi ekstrim seperti Kamboja, dan Thailand tetap menjaga hubungan yang seimbang dengan mitra besar lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kamboja berisiko mengalami ketergantungan ekonomi yang berakhir dengan situasi jebakan utang seperti kasus Hambantota di Sri Lanka.

Kontribusi penelitian ini adalah memperkuat validasi data ekonomi yang sudah dipaparkan, penelitian ini juga menginformasi terkait kekhawatiran *dual-use* pangkalan Ream, terakhir penelitian ini menganalisis hubungan Tiongkok dengan Thailand dan kamboja dari sisi ekonomi, sehingga celah tersebut dapat peneliti isi.

Literatur kelima, artikel berjudul *The Indo-Pacific and the Next Phase of ASEAN Centrality*.¹⁹ Artikel yang ditulis oleh Qiao Franco, dkk berisi kajian relevansi dan keberlangsungan konsep sentralitas ASEAN (*ASEAN centrality*) di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin intensif dalam konteks Indo-Pasifik. Para penulis memulai dari premis bahwa konsep sentralitas ASEAN yang muncul pasca Perang

¹⁹ Guangyu Qiao-Franco, Aleš Karmazin, and Michal Kolmaš, "The Indo-Pacific and the Next Phase of ASEAN Centrality," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 44, no. 3 (December 2025): 413–35, <https://doi.org/10.1177/18681034241307658>.

Dingin kini sedang diuji oleh rivalitas kekuatan besar yang memperketat tekanan struktural terhadap ASEAN. Analisis mereka menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan besar seperti Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, dan Amerika Serikat mendukung peran ASEAN yang lebih besar dalam ranah ekonomi, tetapi tidak memandang ASEAN sebagai mekanisme utama dalam kerja sama politik dan keamanan, sehingga keberlangsungan sentralitas ASEAN menjadi semakin sulit dipertahankan. Temuan penting dari artikel ini adalah bahwa dalam tiga dekade terakhir ASEAN mampu mempertahankan sentralitasnya dengan mengamankan komitmen dari Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, dan Uni Eropa dalam inisiatif yang dipimpin ASEAN, dengan cara menjaga keseimbangan kekuatan secara hati-hati sepanjang prosesnya.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa kondisi ini semakin rapuh. Dalam artikel ini posisi Tiongkok cenderung bersikap relatif enggan untuk sepenuhnya mendukung konsep Indo-Pasifik, karena konsep tersebut diluncurkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya serta sebagian besar ditujukan untuk menyeimbangkan pengaruh regional dan global Tiongkok. Sebagai alternatifnya, Tiongkok mempromosikan visinya sendiri dalam bentuk Belt and Road Initiative, konsep Community of Shared Destiny, serta Global Civilisational, Security and Development Initiatives. Disisi lain AS dalam artikel ini menemukan bahwa meskipun AS secara diskursif mendukung sentralitas ASEAN, preferensi politiknya di Asia justru menunjukkan sedikit perhatian terhadap gagasan tersebut ketika opsi lain tampak lebih melayani kepentingan AS.

Artikel ini memiliki dua kontribusi yang signifikan untuk penelitian ini. Pertama artikel ini menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk menjelaskan mengapa

keterlibatan aktor ekstra-regional dalam konflik Thailand-Kamboja 2025 bukanlah anomali, melainkan cerminan dari pola yang lebih besar di mana kekuatan besar secara selektif menghormati sentralitas ASEAN hanya ketika menguntungkan kepentingan mereka. Temuan bahwa kekuatan besar menganggap ASEAN relevan secara ekonomi tetapi tidak dalam urusan keamanan menjelaskan dengan sangat baik mengapa Tiongkok memilih jalur bilateralnya sendiri melalui shuttle diplomacy dan pertemuan trilateral di luar kerangka ASEAN, sambil tetap secara retorik mendukung prinsip sentralitas ASEAN. Kedua, temuan artikel tentang posisi Tiongkok yang enggan terhadap konsep Indo-Pasifik dan lebih memilih BRI sebagai instrumen pengaruhnya sangat relevan untuk memperkuat argumen penelitian ini tentang mengapa Tiongkok begitu berkepentingan menjaga stabilitas keamanan regional dan aktif terlibat dalam konflik Thailand-Kamboja 2025. Ini memperkuat dimensi *role conception* dalam analisis Teori Peran, yakni bagaimana Tiongkok mendefinisikan dirinya sebagai kekuatan stabilisator kawasan yang berbeda dari model kepemimpinan Amerika Serikat.

Terdapat celah dalam artikel ini, yang paling mendasar adalah bahwa meskipun artikel ini secara sistematis menganalisis respons lima kekuatan besar terhadap sentralitas ASEAN, pembahasannya bersifat makro dan struktural, dan tidak menyentuh bagaimana kekuatan besar seperti Tiongkok berperilaku secara konkret ketika ASEAN gagal mengelola konflik bersenjata di antara anggotanya sendiri. Artikel ini menganalisis kondisi normal dan stabil, bukan kondisi krisis seperti konflik Thailand-Kamboja 2025 di mana ASEAN secara terbuka terbukti tidak mampu merespons dengan cepat. Selain itu, artikel ini tidak menggunakan Teori Peran sebagai

pisau analisis, sehingga tidak mampu menjelaskan bagaimana konstruksi peran Tiongkok dibentuk dan dijalankan dalam situasi krisis konkret. Di sinilah penelitian ini akan mengisi celah yang sangat spesifik, yakni dengan mengoperasionalkan temuan-temuan makro artikel ini ke dalam analisis mikro berbasis Teori Peran untuk menjelaskan perilaku Tiongkok dalam satu peristiwa krisis yang nyata dan terdokumentasi dengan baik.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Peranan Nasional

Peranan nasional merupakan bentuk representasi dari kebijakan luar negeri suatu negara dalam memposisikan diri ketika menghadapi krisis regional maupun internasional. Ketetapan posisi ini menjadi dasar bagi tindakan diplomasi negara tersebut dalam merespon konflik. Menurut Carl W. Backman Peranan nasional adalah pola interaksi antar-pemerintah yang tetap bertahan melampaui masa jabatan para pengambil keputusan guna menjelaskan keteraturan hubungan dalam sistem internasional.²⁰ Selanjutnya, Naomi Bailin Wish mengartikan konsepsi peran nasional sebagai persepsi para pengambil kebijakan luar negeri atas posisi negaranya dalam sistem global.²¹ Hal tersebut mencakup bagaimana mereka memaknai komitmen, aturan, keputusan, dan fungsi jangka panjang yang harus dijalankan negaranya dalam

²⁰ Carl W. Backman, "Role Theory and International Relations: A Commentary and Extension," *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (September 1970): 310, <https://doi.org/10.2307/3013585>.

²¹ Naomi Bailin Wish, "Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions," *International Studies Quarterly* 24, no. 4 (December 1980): 532, <https://doi.org/10.2307/2600291>.

menghadapi dinamika sistem internasional.²² Lalu KJ. Hoslti mendefinisikan peran nasional sebagai.²³

“national role performance as the general foreign policy behavior of governments. It includes patterns of attitudes, decisions, responses, functions and commitments toward other states. A national role conception includes the policymakers’ own definitions of the general kinds of decisions, commitments, rules and actions suitable to their state, and of the functions, if any, their state should perform on a continuing basis in the international system or in subordinate regional systems”

Berdasarkan penjelasan Holsti tersebut, peneliti memahami bahwa peran nasional merupakan perilaku umum suatu pemerintah terhadap negara lain dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang mencakup pola sikap, keputusan, respon, fungsi, dan komitmen. Selain itu, peran nasional mencakup definisi yang dibuat oleh para pembuat kebijakan sendiri mengenai jenis-jenis umum keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka, serta mengenai fungsi-fungsi jika ada yang seharusnya dijalankan oleh negara mereka secara berkelanjutan dalam sistem internasional atau dalam sistem-sistem regional yang berada di bawahnya.

Dari beberapa sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep peran nasional merupakan definisi atau citra mandiri para pembuat kebijakan mengenai jenis keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang dianggap sesuai bagi negara mereka, mencakup pemahaman pemimpin negara mengenai fungsi-fungsi yang harus

²² Wish, “Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions.”

²³ K. J. Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,” *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (1970): 233–309, <http://www.jstor.org/stable/3013584> .

dijalankan oleh negara tersebut secara berkelanjutan, baik dalam sistem internasional global maupun dalam sistem regional.

Sama halnya seperti individu dalam suatu kelompok, negara pun memiliki berbagai identitas di dalam sistem internasional. Hal tersebut dijelaskan oleh Holsti bahwa peran atau identitas nasional suatu negara dapat diidentifikasi melalui klasifikasi tingkat keaktifan dan kapasitas tindakan kebijakan luar negerinya. Dalam buku yang berjudul “*National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*” Holsti menjabarkan 17 jenis peranan nasional, diantaranya:²⁴

1. *Bastion of Revolution-Liberator*

Sebuah negara merasa tugas atau tanggungjawab untuk mengorganisir atau memimpin gerakan revolusioner di luar negeri serta menjadi pusat dukungan fisik, moral, dan ideologis bagi gerakan tersebut.

2. *Regional leader*

Peranan ini merujuk pada tanggung jawab khusus yang dirasakan pemerintah terhadap negara-negara dalam wilayah tertentu atau subsistem yang mereka identifikasi.

3. *Regional Protector*

Peranan ini menekankan pada fungsi memberikan perlindungan keamanan bagi wilayah yang berdekatan dan mencegah penyerang potensial melakukan serangan.

²⁴ Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy.”

4. *Active Independent*

Pada peranan ini sebuah negara melakukan sebuah kebijakan dengan menghindari komitmen militer permanen pada blok besar, namun secara aktif membina hubungan dengan banyak negara dan terkadang melakukan mediasi dalam konflik.

5. *Liberation Supporter*

Sebuah negara berperan dengan memberikan dukungan rutin atau formal terhadap gerakan pembebasan di negara lain, namun tanpa tanggung jawab formal untuk mengorganisir atau memimpin gerakan tersebut.

6. *Anti-Imperialist Agent*

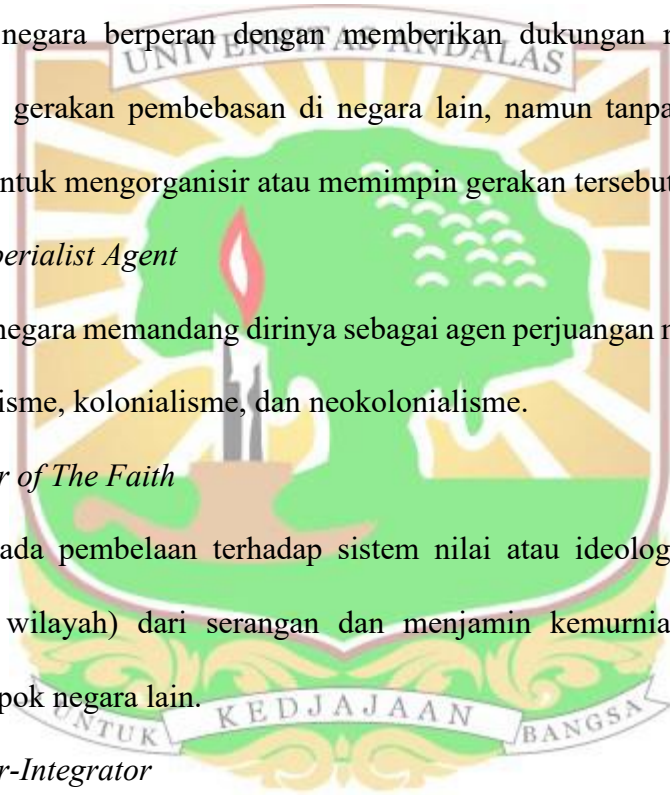
Sebuah negara memandang dirinya sebagai agen perjuangan melawan ancaman imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme.

7. *Defender of The Faith*

Fokus pada pembelaan terhadap sistem nilai atau ideologi tertentu (bukan sekadar wilayah) dari serangan dan menjamin kemurnian ideologis bagi sekelompok negara lain.

8. *Mediator-Integrator*

Peran ini melibatkan tugas berkelanjutan untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mendamaikan perbedaan mereka. Dalam hal ini mereka percaya dan beranggapan bahwa mereka adalah penyelesai di regional maupun global.



9. Regional-subsystem collaborator

Dalam peran ini sebuah negara menunjukkan komitmen luas untuk bekerja sama dengan negara lain dalam membangun komunitas regional yang lebih besar atau memperkuat subsistem tertentu.

10. Developer

Sebuah negara merasa memiliki peran dan kewajiban khusus untuk membantu negara-negara yang kurang berkembang dengan memanfaatkan keterampilan atau keunggulan sumber daya yang dimiliki.

11. Bridge

Sebuah negara berperan sebagai komunikator penyampai pesan dan informasi antara orang-orang atau negara-negara dari budaya dan latar belakang yang berbeda.

12. Faithfully ally

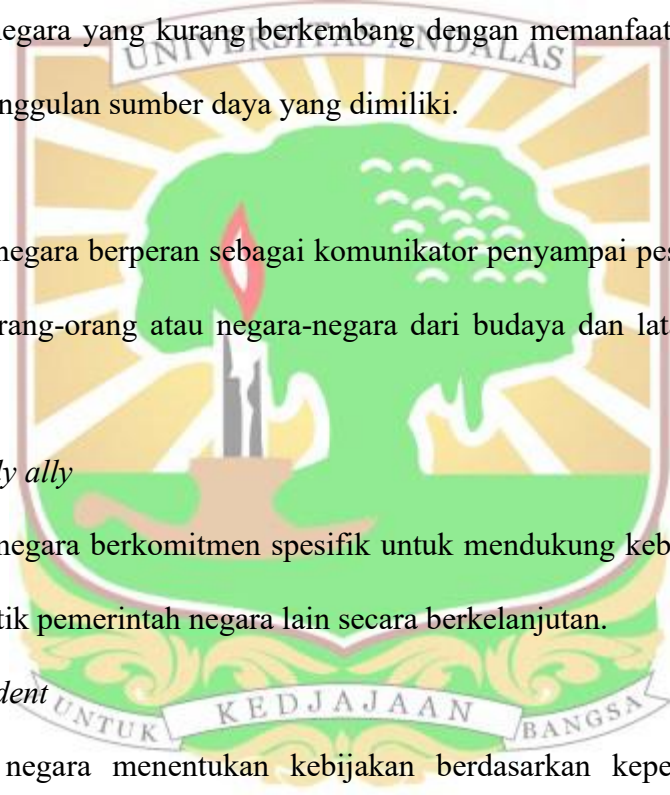
Sebuah negara berkomitmen spesifik untuk mendukung kebijakan dan tujuan diplomatik pemerintah negara lain secara berkelanjutan.

13. Independent

Sebuah negara menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional sendiri tanpa mengikuti arahan negara lain, namun tidak selalu menyiratkan fungsi aktif seperti mediasi.

14. Example

Peran ini Menekankan peningkatan prestise dan pengaruh internasional dengan menunjukkan keberhasilan kebijakan domestik agar dapat menjadi contoh untuk negara-negara lain.



15. Internal Development

Sebuah negara memiliki fokus yang diarahkan pada masalah pembangunan internal dan menghindari terlibat dalam urusan politik internasional yang rumit tetapi masih menjalani kerjasama lain terutama dalam bidang ekonomi dan teknis.

16. Isolate

Sebuah negara menutup kontak eksternal seminimal mungkin, menekankan kemandirian total, dan menghindari bantuan atau keterlibatan asing.

17. Protectee

Menekankan pada tanggung jawab negara-negara lain untuk membela kedaulatan mereka, sementara negara tersebut tidak menunjukkan orientasi aktif lainnya.

Dari 17 jenis peranan yang sudah dijabarkan oleh Holsti, peneliti akan menganalisis dengan cara mengaitkannya dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan Tiongkok dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja 2025. Sebelum melakukan tahap analisis, peneliti akan memahami konsep yang dikembangkan oleh Holsti terlebih dahulu dengan mendalami pengertian dan menginterpretasikan makna dari variasi peranan melalui contoh yang diberikan Holsti dalam artikel yang ia keluarkan.

Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan berbagai kebijakan dan tindakan diplomatik yang dilakukan Tiongkok dalam merespon konflik tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan berdasarkan kronologi waktu guna memetakan kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tiongkok yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terkait peranan Tiongkok dalam konflik perbatasan

Thailand-Kamboja 2025. Setelah melaksanakan penelitian peneliti akan mengkategorisasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan variasi peranan milik Holsti.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell pendekatan ini menjelaskan bahwa fokus pendekatan ini terletak pada eksplorasi dan pemahaman terhadap makna yang diberikan individu atau kelompok pada masalah sosial atau kemanusiaan.²⁵ Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan awal penelitian ini yaitu memahami dan menganalisis makna dari tindakan-tindakan diplomatik yang dilakukan Tiongkok dalam konteks konflik Thailand-Kamboja 2025 secara mendalam dan menyeluruh. Sejalan dengan Creswell bahwa pendekatan kualitatif mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah analisis data yang unik, dan bertumpu pada berbagai desain penelitian. Lebih lanjut Creswell memetakan sejumlah karakteristik dasar penelitian kualitatif yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Natural setting

Seorang peneliti cenderung mengumpulkan data dari sumber- sumber yang terjadi secara alamiah di lapangan, bukan dari situasi yang dikondisikan secara artifisial. Hal tersebut diaplikasikan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data secara langsung dari pernyataan resmi kementerian Luar

²⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4. ed (Los Angeles, Calif.: SAGE, 2014).

Negeri Tiongkok, data berupa dokumen resmi pemerintah, dan laporan lembaga kajian internasional yang merupakan representasi nyata dari perilaku diplomatik Tiongkok.

2. *Multiple sources of data*

Pada bagian ini peneliti akan mengumpulkan berbagai bentuk data seperti dokumen, pernyataan resmi, dan laporan, kemudian mengorganisasikannya ke dalam kategori atau tema yang bersumber dari data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan memanfaatkan beragam sumber data primer berupa pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok terhadap konflik perbatasan Thailand-kamboja dan data berupa dokumen resmi pemerintah. Serta menggunakan artikel ilmiah, laporan lembaga kajian kebijakan atau pusat riset kebijakan publik sebagai sumber data sekunder guna membangun gambaran yang menyeluruh tentang peran Tiongkok.

3. *Inductive and deductive data analysis*

Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam tema-tema tertentu yang lebih spesifik menggunakan pendekatan induktif (dari data khusus ke kesimpulan umum). Caranya, peneliti akan mengumpulkan terlebih dahulu semua pernyataan resmi dari pemerintah Tiongkok. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dianalisis untuk memetakan bagaimana peran Tiongkok dalam konflik tersebut. Setelah pola perannya ditemukan, peneliti baru akan mengujinya secara deduktif menggunakan teori tipologi peran dari K.J. Holsti.

4. *Holistic account*

Pada bagian ini peneliti akan berupaya membangun gambaran yang kompleks tentang masalah yang diteliti dengan melaporkan berbagai perspektif dan mengidentifikasi banyak faktor yang terlibat dalam suatu situasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan bagaimana peran Tiongkok dalam konflik Thailand-Kamboja 2025, diikuti analisis menggunakan 17 tipologi *National Role Conceptions* Holsti (1970).

1.8.2 Batas Penelitian

Dalam sebuah penelitian, batas penelitian merupakan bagian penting dari prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Creswell menegaskan bahwa langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup *setting the boundaries for the study* atau penetapan batas-batas penelitian, yang dilakukan sebelum proses pengumpulan informasi secara substantif dimulai. Penetapan batas bertujuan agar penelitian tetap terfokus dan tidak melebar ke isu-isu yang berada diluar cakupan pertanyaan penelitian.

Pada penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2025 sampai penelitian berakhir. Periode tersebut dipilih karena sejak terjadinya kontak tembak pertama antara pasukan Thailand dan Kamboja pada 28 Mei 2025 hingga gencatan senjata kedua yang ditandatangani pada 28 Desember 2025, meskipun penyelesaian substantif atas sengketa teritorial yang menjadi akar konflik hingga akhir periode penelitian ini belum tercapai.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam studi Hubungan Internasional, peneliti perlu menentukan dua elemen penting ketika menjelaskan suatu peristiwa yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis mengacu pada objek utama observasi dalam penelitian. Penentuan unit analisis bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai apa atau siapa yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Peran Tiongkok dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja 2025. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Creswell bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti perlu mengidentifikasi secara jelas *the actors*, yaitu, siapa yang diamati dan dikaji dalam proses penelitian. Sementara itu unit eksplanasi merupakan variabel atau faktor yang menjelaskan, mempengaruhi, atau menjawab penyebab munculnya variabel lain yang diteliti. Unit eksplanasi penelitian ini adalah Kebijakan Luar Negeri, Pernyataan Resmi, dan Tindakan Diplomatik yang diambil Tiongkok selama konflik berlangsung.

Tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat negara bangsa (*state level*), artinya unit yang akan peneliti analisis adalah negara sebagai aktor tunggal yang bertindak atas nama kepentingan dan identitasnya di panggung internasional, bukan individu pemimpin secara personal, maupun sistem internasional secara keseluruhan. Tingkat analisis ini sesuai dengan kerangka *role theory* Holsti yang dirancang untuk menganalisis perilaku negara berdasarkan bagaimana para pembuatnya mendefinisikan peran negaranya dalam sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi dokumentasi (*document study*) sebagai teknik pengumpulan data.²⁶ Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek yang dikaji adalah pernyataan resmi dan tindakan diplomasi Tiongkok yang seluruhnya terdokumentasi dalam berbagai sumber tertulis yang dapat diakses secara umum. Creswell menjelaskan bahwa dalam proses penelitian kualitatif peneliti dapat mengumpulkan dokumen kualitatif yang mencakup dokumen publik seperti memoar resmi, risalah pertemuan, laporan resmi, dan materi arsip. Creswell juga menegaskan bahwa peneliti perlu mengidentifikasi apakah informasi yang dikumpulkan merupakan data primer, yaitu informasi yang langsung berasal dari pihak atau situasi yang diteliti, atau data sekunder, yaitu laporan tidak langsung yang ditulis oleh pihak lain tentang situasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti akan menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, Data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok (*Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*) terkait konflik Thailand-Kamboja. Kedua, data berupa dokumen resmi pemerintah dan rekaman pertemuan trilateral Tiongkok-Kamboja-Thailand di Shanghai (Juli 2025) dan Yunnan (Desember 2025). Ketiga, pernyataan diplomatik Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Utusan Khusus Deng Xijun. Serta Keempat, dokumen resmi terkait keterlibatan Tiongkok sebagai observer dalam mekanisme *General Border Committee* dan hasil konsolidasi gencatan senjata

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

pada pertemuan Trilateral Yuxi. Data sekunder terdiri dari artikel ilmiah dari jurnal bereputasi internasional, laporan lembaga *think tank* terkemuka seperti Carnegie Endowment for International Peace dan ISEAS-Yusof Ishak Institute, serta pemberitaan media internasional yang kredibel seperti The Diplomat, Al Jazeera, dan I. Data sekunder bertujuan untuk memberikan konteks, analisis, dan interpretasi terhadap tindakan Tiongkok dari sudut pandang pihak ketiga yang independen.

Creswell menyebutkan bahwa dokumen publik seperti surat kabar dan laporan resmi termasuk dalam kategori data kualitatif yang valid, oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan data tersebut dengan memanfaatkan pemberitaan media internasional berputasi sebagai sumber triangulasi untuk memperkuat kredibilitas data, dengan memperhatikan prinsip *multiple sources of data*. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan akan diorganisasikan ke dalam sistem pencatatan yang terstruktur sesuai dengan kategori sumber, tanggal, dan relevansinya terhadap tipologi Holsti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari, mengorganisasikan, dan memahami data dari wawancara, catatan lapangan, atau dokumentasi sehingga peneliti dapat menjelaskan temuannya dengan jelas. Penelitian ini menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga alur yang dilakukan dalam proses menganalisis data di mana alur pertama adalah *data condensation* atau pemadatan data, alur kedua yaitu

data display atau penyajian data, terakhir adalah *drawing and verifying conclusion* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁷

Data condensation atau pemadatan data merupakan tahapan yang berisikan mengenai pemilihan, pengumpulan, pengelompokan, dan proses pengabstrakan yang nantinya data tersebut akan digunakan dalam penelitian. Dalam proses ini peneliti melakukan kondensasi data terkait Thailand dan Kamboja. Kemudian peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan konflik perbatasan yang terjadi antara Thailand dengan Kamboja, relasi Tiongkok dengan Thailand-Kamboja. Lalu peneliti akan mengumpulkan data bagaimana respons, tindakan, dan kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok.

Tahap kedua yaitu, *data display* atau penyajian data. Dalam tahap ini peneliti nantinya akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang sifatnya deskriptif-analitis. Deskripsi tersebut tertuang dalam penulisan BAB I sampai BAB IV. Pada penulisan BAB IV peneliti akan menyajikan hasil analisis menggunakan konsep peranan nasional atau *National Role Conception* yang dikemukakan oleh K.J Holsti.

Terakhir yaitu, *drawing and verifying conclusion* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini kesimpulan dan verifikasi mengenai hasil penelitian terletak pada BAB V yang menekankan kembali hasil dari penelitian mengenai peranan Tiongkok dalam konflik perbatasan Thailand-Kamboja 2025.

²⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014).

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan topik penelitian, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan temuan dari studi pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: HUBUNGAN TIONGKOK DENGAN THAILAND DAN KAMBOJA

Bab ini memaparkan konteks hubungan historis antara Thailand-Kamboja dalam hal perebutan wilayah dan hubungan bilateral Tiongkok dengan masing-masing pihak yang berkonflik sebagai latar belakang struktural, mencakup dimensi ekonomi, politik, dan keamanan yang membentuk posisi strategis Tiongkok sebelum konflik meletus.

BAB III: DINAMIKA KONFLIK PERBATASAN THAILAND-KAMBOJA 2025

Bab ini menjelaskan kronologi konflik secara komprehensif, mulai dari eskalasi insiden militer, hingga respon diplomatik internasional yang muncul selama konflik berlangsung.

BAB IV: PERAN TIONGKOK DALAM KONFLIK PERBATASAN

THAILAND-KAMBOJA 2025

Bab ini merupakan inti penelitian yang mengidentifikasi peran Tiongkok menggunakan tipologi Holsti, melalui pernyataan resmi para pemimpinnya.



BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian secara langsung serta rekomendasi yang ditujukan bagi kalangan akademis maupun para pengambil kebijakan luar negeri, khususnya dalam konteks ASEAN.

